

SKRIPSI
PENERAPAN HAK TERSANGKA MENGHADIRKAN SAKSI
MERINGANKAN DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN
PASAL 65 KUHP DI KOTA PADANG

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Andalas*

Oleh:

ICHA OCTAVIANA TINDAON

(2110113041)



Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H. (Pembimbing 1)

Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H. (Pembimbing 2)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa: Icha Octaviana Tindaon	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Bagan Batu / 05 Oktober 2003 b. Nama Orangtua : Sumadi P. Sitindaon Amd. Kep. Misnah, Amd. Keb. c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2110113041	f. Tanggal Lulus : 28 Juli 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 11 Bulan i. IPK : 3,80 j. Alamat : Balam Sempurna Km. 26, Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir, Riau.	

PENERAPAN HAK TERSANGKA MENGHADIRKAN SAKSI MERINGANKAN DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 65 KUHAP DI KOTA PADANG

(Icha Octaviana Tindaon, 2110113041, Program Kekhususan Hukum Pidana (Pk IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 Halaman, 2026)

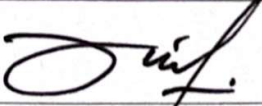
ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam rangka menjamin prinsip *due process of law* dan *fair trial* pada tahap penyidikan. Dilapangan praktiknya, pelaksanaan hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses pembuktian sejak tahap awal. Sejalan dengan perkembangan hukum acara pidana, pemenuhan hak pembelaan menuntut pelaksanaan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak tersangka dalam menghadirkan saksi meringankan pada tahap penyidikan di Kota Padang serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya optimalisasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan advokat yang berpengalaman mendampingi tersangka dalam perkara pidana di Kota Padang. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan normatif dalam KUHAP dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak tersangka untuk menghadirkan saksi meringankan telah diatur dalam KUHAP, namun dalam praktiknya pelaksanaan hak tersebut belum berjalan secara optimal. Dalam beberapa kasus, penyidik hanya menanyakan keberadaan saksi meringankan secara formalitas tanpa memfasilitasi pemeriksaan secara substantif pada tahap penyidikan, serta cenderung mengarahkan agar saksi dihadirkan pada tahap persidangan. Faktor penghambat pelaksanaan hak tersebut antara lain rendahnya kesadaran hukum tersangka, keterbatasan peran advokat pada tahap awal penyidikan, orientasi penyidik pada percepatan penyelesaian perkara, serta kurangnya pengawasan terhadap implementasi Pasal 65 KUHAP. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen aparat penegak hukum, optimalisasi peran advokat, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan proses penyidikan yang adil dan menghormati hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hak Tersangka, Saksi Meringankan, Penyidikan, Pasal 65 KUHAP, *Due Process of Law*.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 28 Juli 2026

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang: Icha Octaviana Tindaon	Iwan Kuniawan, S.H., M.H.	Felia Hermayenti, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Student Name: Icha Octaviana Tindaon	Alumni Faculty Number
	a. Place/Date of Birth : Bagan Batu / 05 th October 2003 b. Parents' Name : Sumadi P. Sitindaon Amd. Kep. Misnah, Amd. Keb. c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. Student ID : 2110113041		f. Graduation Date : 28 th July 2026 g. Pass Predicate : With Praise h. Length of Study : 4 years 11 months i. GPA : 3,80 j. Address : Balam Sempurna Km. 26, Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir, Riau.

THE EXERCISE OF A SUSPECT'S RIGHT TO CALL MITIGATING WITNESSES DURING THE INVESTIGATION PROCESS UNDER ARTICLE 65 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE IN THE CITY OF PADANG

(Icha Octaviana Tindaon, 2110113041, Criminal Law Specialization Program (Pk IV), Faculty of Law, Andalas University, 65 pages, 2026)

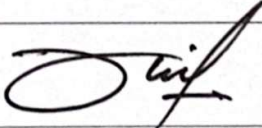
ABSTRACT

This study is motivated by the importance of ensuring the right of suspects to present exculpatory witnesses (a de charge), as stipulated in Article 65 of the Criminal Procedure Code (KUHP), in order to guarantee the principles of due process of law and a fair trial during the investigative stage. In practice, the exercise of this right still faces various obstacles, potentially leading to an imbalance in the evidentiary process from the very beginning. In line with developments in criminal procedure law, the fulfillment of the right to defense requires implementation that is not merely normative but also substantive. This study aims to analyze the exercise of a suspect's right to present exculpatory witnesses during the investigative stage in the city of Padang, as well as to identify the inhibiting factors and efforts to optimize it. The research method used is a descriptive-analytical legal-empirical approach. Data was obtained through literature review and interviews with lawyers experienced in representing suspects in criminal cases in the city of Padang. The data was analyzed qualitatively by linking the normative provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP) with their implementation in practice. The research findings indicate that, in theory, the suspect's right to present exculpatory witnesses is regulated under the Criminal Procedure Code; however, in practice, the exercise of this right has not been fully realized. In some cases, investigators merely inquire about the existence of exculpatory witnesses as a formality without facilitating a substantive examination during the investigative stage, and they tend to direct that witnesses be presented during the trial phase. Factors hindering the exercise of this right include the suspect's low legal awareness, the limited role of defense counsel during the early stages of the investigation, investigators' focus on expediting case resolution, and a lack of oversight regarding the implementation of Article 65 of the Criminal Procedure Code. Therefore, it is necessary to strengthen the commitment of law enforcement officials, optimize the role of defense attorneys, and increase public legal awareness in order to realize a fair investigative process that respects human rights.

Keywords: Rights of the Suspect, Mitigating Witnesses, Investigation, Article 65 of the Criminal Procedure Code, Due Process of Law.

This minor thesis has been successfully defended and regarded to graduate by July 28th, 2026.

Examiner,

Signature 	1. 	2. 
Name: Icha Octaviana Tindaon	Iwan Kuniawan, S.H., M.H.	Felia Hermayenti, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of State Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

No. Alumni Faculty	Faculty/University Officer
Name:	Signature: